



RENJA TAHUN 2022



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SETDA MALUKU**

*JALAN RAYA PATTIMURA NO 1 AMBON
TELEPON : 0911- 353573*

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2022 dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2022 memiliki kedudukan yang strategis karena memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu tahun anggaran sebagai pengejawantahan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berfungsi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

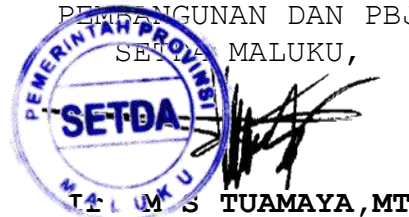
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Biro Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku tahun 2020 menunjukkan progres yang cukup positif. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pijak dalam penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku tahun 2022. selain itu dalam Renja 2022 juga memuat program dan kegiatan baru yang bersifat prioritas dalam rangka menunjang pencapaian Visi, Misi, Target dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, saran dan rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan dan arah kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2022.

Ambon, Maret 2021

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGANGUNAN DAN PBJ
SETDA MALUKU,



SETDA
MALUKU

T. S. TUAMAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640702 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3. Program Dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	Error!
	Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel II-2 .. Pencapaian/Target Kinerja Pelayanan SKPD BIro Biro
Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Setda Maluku 20

Tabel III-1... Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Biro Biro
Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku.. **Error!**
Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan.....	2
Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD.....	3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

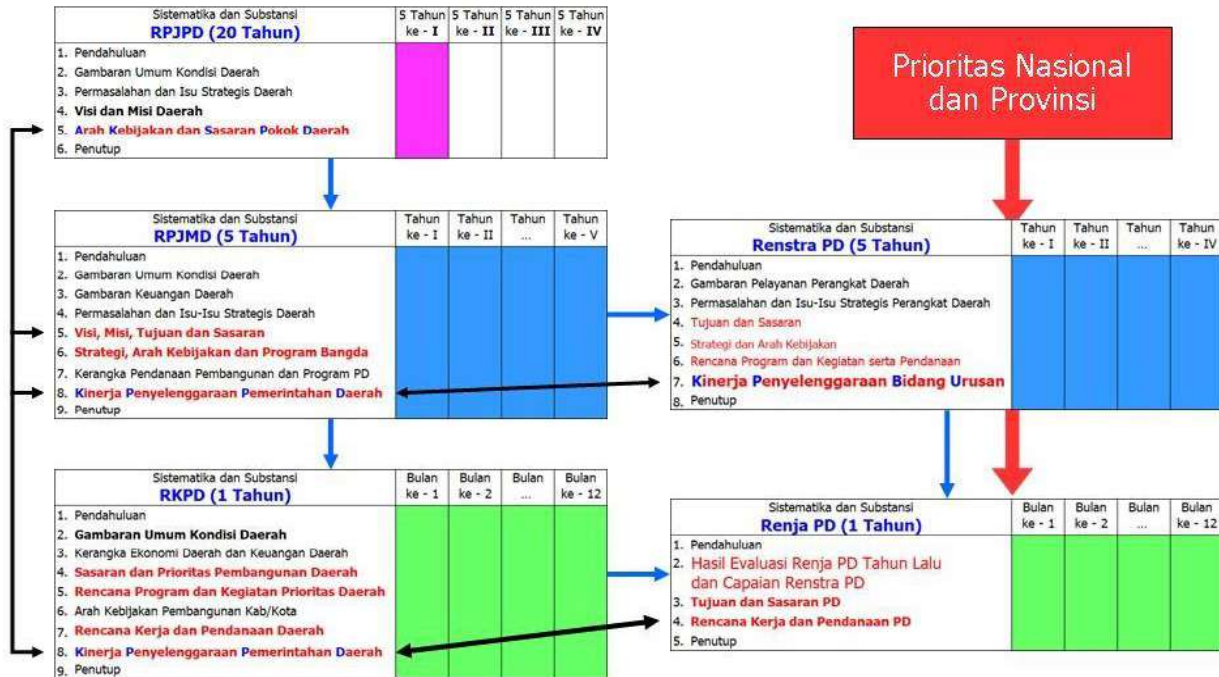
Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional, seperti terlihat pada gambar 1.1. dibawah ini.

Gambar 1.1.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional, sebagaimana terlihat pada gambar 1.2.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

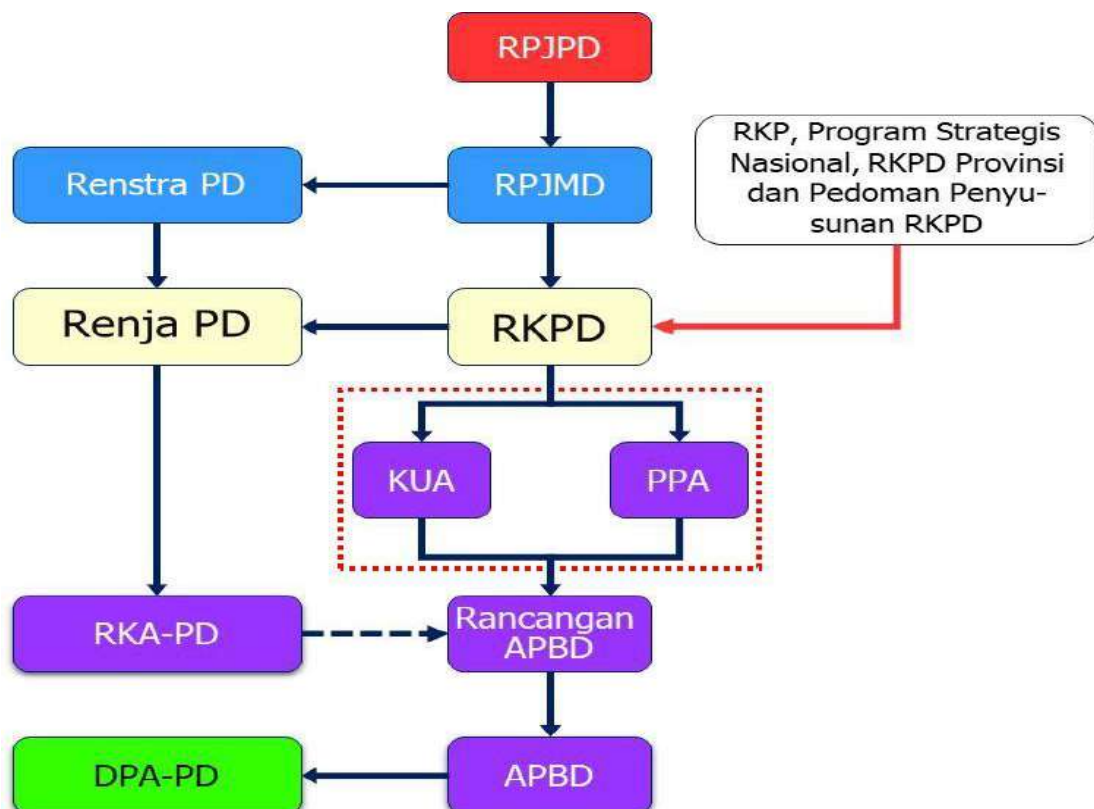
1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja

Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja Perangkat Daerah hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Setda Maluku Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, jo. Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, jo. Undang-Undang No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku ;
18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 melalui perencanaan kinerja tahunan

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2022 ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan dan

PBJ Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

- b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2020 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Asministasi Pembangunan dan PBJ dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen Renja Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PBJ SETDA MALUKU TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB V` PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2020 Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku melaksanakan sebanyak 8 (*Delapan*) Program yang dijabarkan dalam 20 (*Dua Puluh*) kegiatan, dengan rencana anggaran sebagaimana tersaji dalam APBD sebesar Rp. 4.111.368.405.- (*Empat Milyar Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*). Dan pada Triwulan ke II tahun 2020 terjadi Refocusing dalam APBD Perubahan Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2020 menjadi Rp. 2.050.886.900,- (*Dua Miliar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) yang digunakan untuk membiayai 8 Program dan 20 Kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku

Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan Anggaran sebesar Rp. 2.013.686.505.- total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.768.285.665.- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) atau 87,81%.

Secara detail pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku. Indikator program adalah

terwujudnya tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%.

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku dan bersifat rutin. Alokasi anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 328.294.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Deklapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Robu Rupiah)

Adapun pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya jasa surat menyurat berupa meterai 6000 sebanyak 400 lembar Meterai. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 2.250.000 (*dua juta dua ratus lima puluh*) capaian Indikator Kinerja 94.33%

2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya 1 orang cleaning service dan bahan pembersih berupa : bayfresh spray, bayfresh refil AC, kemoceng, clear pembersih kaca, tisu bahan, tisu biasa, cairan pembersih piring, canebo, kanfer, sapu plastik, kain pel, plastik sampah, super pel, taplak meja TV, taplak meja rapat dan fas bunga. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.500.000.- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 7.500.000 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) capaian indikator kinerja 100%

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya Alat Tulis Kantor berupa : Kertas HVS Folio

70 gram sebanyak 40 rim, kertas HVS Kwarto 70 gram sebanyak 28 rim, tinta printer Epson sebanyak 12 botol, pena pilot G7 sebanyak 30 buah, flashdisk sebanyak 5 buah dan alat tulis lainnya. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26.065.000,- (*Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 26.065.000,- (*Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) Capaian indikator kinerja sebesar 100%

4) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya makanan dan minuman rapat sebanyak 7 kali untuk 140 ASN dan 30 Snak tamu serta makan dan minuman di meja rapat dan meja pimpinan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.550.000,- (*Dua Juta Lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.250.000,- (*Dua Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan indikator capaian kinerja 88,24%

5) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya 6 ASN mengikuti koordinasi dan konsultasi ke Jakarta dan Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 61.200.000,- (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) dengan realisasi Anggaran Rp. 35.891.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan indikator capaian Kinerja 58,65%.

6) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran.

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas kantor, dengan 6 orang staf pendukung administrasi. Pagu

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 162.549.504.80.- (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Sen*) dengan realisasi Rp. 162.028.490,- (*Seratus Enampuluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat ratus Sembilan Puluh Rupiah*) .
Capaian indikator kinerja sebesar 99,68%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak serta mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasana untuk mewujudkan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor. Target program adalah terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur.

Program ini terdiri dari 5 (Lima) Kegiatan yang fungsi untuk terpeliharanya asset tetap bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku dan bersifat rutin. Alokasi anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 328.294.000 (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya 1 unit meja kerja pimpinan dan 1 unit meja TV. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 68.220.000,- (*Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan Capaian indikator kinerja sebesar 100%

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya suku cadang, BBM dan perawatan kendaraan

sebanyak 1 paket. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.28.209.000,- (*DuaPuluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.24.514.375 (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belah Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), dengan capaian indikator kinerja 86,90%

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terawatnya 3 unit laptop dan 2 unit printer. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesarRp. 10.000.000,- (*Sepuluh Rupiah*) dengan realisasi Rp. 4.202,000.- (*Empat Juta Dua ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*). Capaian indikator kinerja sebesar 42,02%

4) Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional biro.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesarRp. 64.200.000,- (*Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) dengan Capaian indikator kinerja sebesar 100%

5) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya 25 unit meja kerja pimpinan dan 1 unit meja TV. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesarRp. 157.665.504,- (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*) dengan realisasi anggaran Rp. 155.715,000,- (*Seratus Lima Puluh Lima juta Tujuh ratus Lima Belas Ribu Rupiah*). Capaian indikator kinerja sebesar 98.76%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor.

1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output keikutsertaan 10 orang aparatur mengikuti Diklat Prosedur dan Cara Penilaian Barang Milik Daerah (BMD). Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 86.825.000,- (*Delapan Pulu Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 48.783.200,- (*Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*) Capaian indikator kinerja sebesar 56,18%

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan dalam rangka terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan.

1) pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya 1 stel Pakaian khusus hari-hari tertentu dan 1 Steel Pakaian Olahraga ASN Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.500.000,- (*Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 53.144.000 dan Capaian indikator kinerja sebesar 100%

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dilaksanakan dalam rangka terlaksananya lelang melalui e-Procurement.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 281.168.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*). dengan realisasi sebesar Rp. 269.026.100,- (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*) atau 95,68%.

6. Pengembangan Layanan Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya Lelang melalui e-Procurement, Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 281.168.000,- (*Dua Rtaus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu*) dengan realisasi Rp. 269,026,100,- (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*) Capaian indikator kinerja sebesar 95,68%.

7. Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan dilaksanakan dalam rangka terwujudnya peran Provinsi dalam mendorong kerjasama antar Kabupaten dan Kota

- 1) Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Administrai Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan pelaksanaan Pembangunan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 198.700.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 178.352.400 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat ratus Rupiah*) dengan capaian indikator kinerja sebesar 89,76%

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

- 1) Pengembangan Unit layanan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Terwujudnya Pengadaan Barang/Jasa secara Efektif dan Transparan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 153.654.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 92.773.000,- (*Sembilaqn Puluh Dua Juta Tujuh Ratus*

Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan Capaian indikator kinerja sebesar 60,38%

2) **Pembinaan dan Pengendalian ULP dan LPSE**

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terbinanya dan Terrkendalnya UKPBJ dan LPSE di Kabupaten/Kota. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 111.274.000,- (*Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 92.712.100,- (*Smbilan Puluh Dua Juta Tujuh ratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah*) dengan Capaian indikator kinerja sebesar 83,32%

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) **Monitoring Evaluasi dan Pelaksanan Pembangunan Daerah.**

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Tersedianya laporan monev tentang pelaksanaan pembangunan di 20 Kecam,atan pada 7 Kabupaten Kota di Provinsi Maluku . Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 313,387.000,- (*Tiga Ratus Tiga Breelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 278.621.300,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah)* dengan Capaian indikator kinerja sebesar 88,91%

2) **Evaluasi Pengawasan Pngendalian dan Percepatan Penyerapan Anggaran**

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Tersedianya Dokumen Laporan Palkasanaan Paket Kegiatan dan Realisasi Keuangan dan Fisik per SKPDE lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 261.520.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 242.681.400,- (*Dua Ratus Empat*

*Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu
Emapt Ratus Rupiah)*

Capaian indikator kinerja sebesar 92,80%

dari detail pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijelaskan tersebut akan terlihat pada hasil pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2020 dan perkiraan capaiannya di Tahun 2022 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. dibawah ini.

dari detail pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijelaskan tersebut akan terlihat pada hasil pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2020 dan perkiraan capaiannya di Tahun 2022 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. dibawah ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku, Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku sebagaimana Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2020 yaitu *"Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam pengoorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa."*

Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku dalam menyusun program dan kegiatan mengacu pada Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 masih menggunakan Peremendagri Nomor 13 sedangkan Kegiatan Tahun 2022 disesuaikan dengan Permendagri 90 dan Kepmendagri Nomor 50 dan masih berpedoman pada Renstra Biro Administrasi pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku 2019-

2024. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan perubahan pada struktur, program dan kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku sejak tahun 2021, yang berimplikasi pada perubahan target kinerja.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku terdapat dalam table 2.2.

Tabel II-2

Pencapaian/Target Kinerja Pelayanan SKPD Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kelancaran Pelaksanaan Tugas-Tugas Administtrasi Perkantoran (Persen)			75	80	85	90	89	82	84	90	
2	Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang Berkualitas sesuai Kompetensi (Persen)			75	80	85	90	91	78	0,5	90	
3	Terlaksananya Laporan Kegiatan APBD Provinsi maluku yang Efektif dan Akuntabel (Persen)			75	80	85	90	90	90,6	77	90	
4	Terwujudnya Sinergitas Program dab Kegiatan Yang didanai oleh APBD dan APBN dan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota (Persen)			75	80	85	90	89	89,7	73	90	
5	Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tercapai (Persen)			75	80	85	90	90	80,6	81	90	
6	Kelancaran Pelelangan Barang/Jasa di LPSE (Persen)			75	80	85	90	87	83,2	93	90	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal diantaranya, harmonisasi kebijakan (ada/tidaknya kebijakan yang belum disesuaikan/diperbaharui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini), ketersediaan data , koordinasi lintas SKPD), kurangnya SDM.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku , terdapat beberapa isu penting, sebagai berikut :

- 1) Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Maluku, yang berdampak pada Kesehatan dan Aktifitas perkantoran serta perekonomian ,sehingga harus dilakukan Racionalisasi Anggaran' ;
- 2) Keterbatadsan sarana dan prasarana dalam merndukung operasional dan rutinitas perkantoran,serta menunjang pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Tingkat Kematangan UKPBJ belum mencapai level 9 dan tingkat standarisasi LPSE Provinsi maluku belum mencapai Standarisasi 17 Standart.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. RPJMN

Penyusunan Renja Biro Administrasi pembangunan dan PBJ Setda Maluku mengacu pada Renstra Biro Administrasi pembangunan dan PBJ Setda Maluku dan RPJMD Provinsi Maluku, dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah.

3.1.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Biro Administrasi pembangunan dan PBJ Setda Maluku dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) 2021 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan focus Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, serta Pengelolaan dan Pengadaan Barang/Jasa, dengan sasaran dan target yang harus dicapai.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2021 merujuk kepada Rencana Strategis Biro Administrasi pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2019-2024. dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Peiode 2019-2024. dimana masing-masing perangkat daerah harus merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, agar aktivitas pelayanan masyarakat lebih terarah dan focus.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 *"Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan*

Kepulauan" maka Biro Administrasi pembangunan dan PBJ Setda Maluku menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 dengan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 50 Tahun 2020.

Program/kegiatan Biro Administrasi pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2022 dengan 3 Program yang dijabarkan dalam 10 Kegiatan dan 18 Sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku, yaitu:

- 1) Kegiatan Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 2) Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 4 sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan dan Logistik kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Jasa Peniunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa Surat Menyurat

- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
 - c) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan Lainnya
 - d) Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya
- 6) Kegiatan pengelolaan Pengadaan barang dan jasa dengan 1 sub kegiatan:
- a) Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa
- 7) Kegiatan pengelolaan layanan Penmgadaan Secara Elektronikdengan 1 sub kegiatan:
- a) Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- 8) Kegiatan pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan jasa dengan 1 sub kegiatan:
- a) Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan barang dan Jasa
- 9) Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Sub Kegiatan :
- a) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
- 10) Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Sub Kegiatan :
- a) pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 SUMBER DANA APBD
PROVINSI MALUKU**

SKPD : **Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku**

(Dalam Juta Rupiah)

KODE	PRIORITAS /FOKUS	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					100%	1,288,184		100%	1,417,003	
4 01 01 1.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					403,000			443,300	
4 01 01 1.01		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Kota Ambon	-	-	100%	53,000		100%	58,300	
4 01 01 1.01		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Perkembangan Kegiatan APBD Prov. Maluku yang akurat dan akuntabel	Provinsi & Provinsi Lain	-	-	100%	350,000		100%	385,000	
4 01 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					225,000			247,500	
4 01 01 1.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakain olah raga dan pakaian batik	Kota Ambon	-	-	100%	75,000		100%	82,500	
4 01 01 1.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kota Ambon	-	-	100%	150,000		100%	165,000	
4 01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					292,500			321,750	
		1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	Kota Ambon	-	-	100%	150,000		100%	165,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Ambon	-	-	100%	35,000		100%	38,500
			1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	-	-	100%	7,500		100%	8,250
			1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan pembangunan	Kota Ambon	-	-	100%	100,000		100%	110,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					197,684			217,453
			1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai yang terpakai dalam penyelenggaraan Administrasi Kegiatan	Kota Ambon	-	-	100%	2,625		100%	2,888
			1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Kota Ambon	-	-	100%	195,059		100%	214,565
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170,000			187,000
			1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Suku Cadang, BBM dan Peralatan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	Kota Ambon	-	-	100%	50,000		100%	55,000
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Suku Cadang, BBM dan Peralatan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	Kota Ambon	-	-	100%	55,000		100%	60,500
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya ruangan yang representatif	Kota Ambon	-	-	100%	50,000		100%	55,000
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Ambon	-	-	100%	15,000		100%	16,500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							1,650,000			1,815,000
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						550,000			605,000
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya sistem lelang melalui e-procurement	Provinsi dan Provinsi Lain	-	-	100%		550,000		100%	605,000
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						650,000			715,000
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya Data kelola Klinik Pengadaan yang baik	Kota Ambon	-	-	100%		650,000		100%	715,000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						450,000			495,000
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terbinanya sistem pengelolaan UKPBJ Kab/Kota	Kota Ambon dan kabupaten	-	-	100%		450,000		100%	495,000
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							1,925,000			2,117,500
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						625,000			687,500
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaksanaan pembangunan	Kota Ambon	-	-	100%		175,000		100%	192,500
				02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaksanaan pembangunan	Kota Ambon	-	-	100%		150,000		100%	165,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			03		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	Kabupaten dan Kota	-	-	100%	300,000		100%	330,000
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					1,300,000			1,430,000
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Penyampaian laporan pembangunan tepat waktu	Kota Ambon	-	-	100%	350,000		100%	385,000
				02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Sistem Evaluasi dan penyusunan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Ambon	-	-	100%	600,000		100%	660,000
				03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Terselenggaranya perumusan kebijakan administrasi pembangunan daerah	Kota Ambon	-	-	100%	350,000		100%	385,000
JUMLAH											4,863,184.405			5,349,502.846

Ambon, April 2021

Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ

Setda Maluku



Ir. M. S. TUANAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 196407021998031003

*kegiatan dalam huruf berwarna merah merupakan kegiatan yang tidak terdapat dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2020, dan akan diusulkan penambahannya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada table 4.1. dibawah ini. Tabel 4.1. berisi program pembangunan daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku di tahun 2022 adalah sebanyak 3 program 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program, kegiatan dan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.499.998.645,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Pyuluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

BAB V PENUTUP

Failing to plan is planning to fail, kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ekonomi sama dengan merencanakan kegagalan Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku.

Renja Perangkat Daerah disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Renja Perangkat Daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku.

Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan

rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap sub kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Biro Administrasi pembangunan dan PBJ Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Demikian Renja Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku ini disusun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Amin...

Ambon, Maret 2021

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAN PBJ
SETDA MALUKU,




I. N. S. TUANAYA, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19640702 199703 1 003